

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan suatu prinsip pemerintah pada era globalisasi ini. Penerapan *Good governance* sangat dipengaruhi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena masyarakat merupakan salah satu faktor penggerak adanya *Good governance* di pemerintahan. Untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Yang akhirnya dikeluarkanlah Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan prinsip *Good governance*, diperlukan pula adanya perubahan paradigma mengenai keuangan negara ataupun keuangan daerah, dimana keuangan negara dan keuangan daerah merupakan salah satu alasan adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Seiring dengan adanya perubahan paradigma mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, maka perlu adanya perubahan diberbagai bidang lainnya, untuk mendukung adanya perubahan paradigma mengenai keuangan negara dan juga keuangan daerah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam akuntansi pemerintahan, karena melalui proses akuntansi didapatkan informasi keuangan dibutuhkan dari berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang diinginkan dalam bidang akuntansi pemerintahan adalah adanya standar akuntansi pemerintah (SAP).

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya, dan pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga prinsip *good governance* dapat tercapai.

Standar akuntansi pemerintah yang pertama di Indonesia terbit pada tahun 2005. Standar akuntansi pemerintah yang diterbitkan tahun 2005 tersebut merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Kemudian pada tahun 2010 dilakukan pembaruan sehingga muncul standar akuntansi berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Sampai dengan tahun 2014, basis akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah basis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*) atau yang dikenal dengan singkatan CTA.

Dengan adanya suatu penyusunan laporan keuangan, dalam suatu pemerintahan maupun suatu instansi pemerintahan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan suatu keputusan. Karena dengan adanya laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi mengenai prediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pengelolaan keuangan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintahan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintahan harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa

depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantupengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasilmasa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktudapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapatmempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yangmelatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalamlaporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalampenggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yangmenyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, sertadapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi sertaperistiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapatdiharapkan untuk disajikan.

- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- d) Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- e) Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) pada tahun 2016 mencatat Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2016 disajikan pada Tabel 1. Berikut ini :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016

No	permasalahan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah & BUMD		BUMN & Badan Lainnya		total	
		jumlah kasus	nilai (Rp juta)	jumlah kasus	nilai (Rp juta)	jumlah kasus	nilai (Rp juta)	jumlah kasus	nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI									
1	SPI	251	-	860		282		1393	
Ketidak Patuhan terhadap undang-undang yang mengakibatkan									
1	Kerugian	217	139.095,84	957	418.454,91	31	816.630,86	1205	1.374.181,61
2	Potensi Kerugian	29	2.562.535,33	255	1.554.893,28	45	2.437.219,84	329	6.554.648,45
3	Kekurangan Penerimaan	102	1.854.740,25	301	627.011,49	31	2.185.791,07	434	4.667.542,81
	Subtotal 1 (berdampak finansial)	348	4.556.371,42	1.513	2.600.359,68	107	5.439.641,77	1.968	12.596.372,87
4	Penyimpangan Administrasi	158		397		62		617	
5	ketidakhematan	32	51.988,05	74	45.736,12	21	1.385.656,42	127	1.483.380,59
6	ketidak efisienan			1		26	887.852,78	27	887.852,78
7	ketidak efektifan	473	324.473,17	2.829	334.446,86	160	3.854.026,47	3462	4.512.946,50
	Subtotal 2 (tidak berdampak finansial)	663	376.461,22	3.301	380.182,98	269	6.127.535,67	4.233	6.884.179,87
	total ketidak patuhan	1.011	4.932.832,64	4.814	2.980.542,66	376	11.567.177,44	6.201	19.480.552,74
	total	1.262	4.932.832,64	5.674	2.980.542,66	658	11.567.177,44	7.594	19.480.552,74

Sumber : BPK RI

Keterangan dari tabel diatas berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, secara umum BPK mengungkapkan sebagai berikut:

- Terhadap 9 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 1 (11%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 7 (78%) LKPD dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 1 (11%) LKPD.
- Terhadap 316 objek pemeriksaan kinerja, BPK menyimpulkan kinerja pada umumnya belum sepenuhnya efektif.
- Terhadap 279 objek PDTT, BPK menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern (SPI) atas 2 objek pemeriksaan sudah sesuai dan 3 objek pemeriksaan cukup sesuai, 230 objek pemeriksaan belum/belum sepenuhnya sesuai, serta 44 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 7.594 permasalahan, meliputi 1.393 (18%) kelemahan SPI dan 6.201 (82%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun. (sumber BPK RI : IHPS II tahun 2016).

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 1.968 (32%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun. Perinciannya sebagai berikut:

- Kerugian negara sebanyak 1.205 (61%) permasalahan senilai Rp1,37 triliun.
- Potensi kerugian negara sebanyak 329 (17%) permasalahan senilai Rp6,55 triliun.

- Kekurangan penerimaan sebanyak 434 (22%) permasalahan senilai Rp4,66 triliun.

Selain itu, terdapat 4.233 (68%) permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial, terdiri atas 617 (14%) penyimpangan administrasi dan 3.616 (86%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp6,88 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp130,78 miliar (1,03%).

Dari data tabel diatas, merupakan keseluruhan laporan yang diterima dari berbagai instansi pemerintahan di Indonesia, tidak terkecuali tempat penelitian yang diteliti oleh peneliti, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Dari data di atas Kementerian Agama Kabupaten Lebak Prov. Banten, dapat mewakili dari hasil temuan BPK atas laporan keuangan tahunan. Karena di Kementerian Agama Kabupaten Lebak juga menyusun laporan keuangan yang dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang no.71 tahun 2010. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak sendiri memiliki empat satuan kerja yang masing-masing memiliki empat orang bendahara yang menyusun laporan keuangan yang dilaporkan kepada kantor wilayah Prov.Banten. empat satuan kerja yang ada di Kementerian agama Kabupaten Lebak antara lain :

1. Sekretariat
2. Ditjen Bimas Islam

3. Ditjen pendidikan Islam
4. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Sebagaimana yang telah ditemukan dalam fenomena yang ada pada data tabel diatas, terdapat beberapa instansi pemerintahan yang masih melaporkan laporan keuangan tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan sehingga dapat terjadi kerugian dan salah satu instansi yang termasuk dalam fenomena tersebut adalah Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

Dalam pelaporan keuangan menurut undang-undang no.71 tahun 2010 bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini juga dapat diketahui bahwa laporan keuangan pemerintahan mempunyai nilai informasi yang sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan atau tindakan dalam pemerintahan.

Didalam laporan keuangan pemerintah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Sumberdaya yang berkompeten untuk dapat menerapkan akuntansi pemerintahan
2. Teknologi informasi untuk mendukung berjalannya laporan akuntansi
3. Pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi informasi

4. Sitem pengendalian intern dan komitmen pimpinan dalam pelaporan keuangan

Di Kementrian Agama Kabupaten Lebak juga terjadi permasalahan yang sesuai dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah, diantaranya yaitu faktor pertama mengenai sumber daya yang berkompeten untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan, dapat ditemukan bahwa sumber daya manusia yang ada pada masing-masing bendahara satuan kerja Kementrian Agama Kabupaten Lebak tidak sesuai dengan kompetensi dasar penyusun akuntansi atau akuntan. Masing-masing satker memiliki latar belakang variatif yang bukan basic akuntan keuangan. Kemudian dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan penyusunan dokumen pendukung laporan, seperti SPJ dan bukti bukti lainnya kurang mendukung laporan keuangan yang disusun, sehingga dalam pelaporan keuangan bukti pelaporan kurang maksimal.

Permasalahan yang kedua mengenai teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan pelaporan keuangan pemerintahan di Kementrian Agama Kabupaten Lebak menggunakan sitem aplikasi yang dinamakan SAIBA (Sistem Aplikasi Berbasis Akrual), dimana aplikasi itu membantu untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang tentang laporan keuangan pemerintahan. Namun, tidak seluruhnya bendahara yang ada di kemetrian agama kabupaten lebak menguasai aplikasi tersebut, sehingga untuk menjalankan aplikasi tersebut terkendala oleh bendahara yang tidak menguasai aplikasi tersebut.

Permasalahan yang ketiga mengenai pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi informasi, bahwa dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Banten telah mengadakan pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan melakukan sosialisasi sistem teknologi informasi penyusunan laporan keuangan atau yang disebut SAIBA. Pelatihan tersebut diikuti oleh masing-masing bendahara di satuan kerja masing-masing Kementerian Agama Kabupaten yang ada di Wilayah Provinsi Banten. Selain itu pula masih banyak permasalahan yang dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintahan.

Penulis menelaah dari permasalahan tersebut dapat dijadikan suatu penelitian ilmiah yang terjadi di laporan keuangan pemerintahan dengan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK .**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditemukan beberapa permasalahan mengenai permasalahan yang terjadi atas laporan hasil BPK, di mana peneliti melakukan penelitian di salah satu kementerian yaitu Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang juga menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka dari permasalahan di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan, Kementerian agama menyusun laporan keuangan yang dilakukan oleh masing-

masing bendahara satker yang berlatar belakang pendidikan bukan pada bidang akuntansi sehingga hasil laporan keuangan pemerintahan disusun tidak maksimal, dengan adanya hambatan-hambatan berupa dokumen pendukung laporan, seperti SPJ dan bukti-bukti lainnya untuk mendukung laporan keuangan yang kurang lengkap untuk pelaporan keuangan pemerintahan.

2. Sistem informasi yang digunakan dalam menyusun pelaporan keuangan pemerintahan Kementerian Agama kabupaten Lebak yang dapat menunjang penyusunan laporan keuangan pemerinthan, tidak seluruhnya bendahara yang ada mengetahui atau menjalankan aplikasi tersebut, sehingga terdapat bendahara yang kurang maksimal dalam menjalankan aplikasi tersebut.
3. Hasil dari laporan keuangan pemerintah merupakan suatu informasi yang sangat penting untuk pengguna laporan keuangan dalam memutuskan suatu kebijakan, hal itupun terjadi di kementerian agama kabupaten bahwa informasi dari laporan keuangan masih kurang maksimal untuk menjadi informasi yang prioritas, karena terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah di Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Informasi laporan keuangan pemerintah yang terjadi di Kementrian Agama Kabupaten Lebak ?
2. Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi informasi Laporan Keuangan Pemerintahan di Kementrian Agama Kabupaten Lebak ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana informasi laporan keuangan pemerintah yang terjadi di Kementrian Agama Kabupaten Lebak
2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi informasi laporan keuangan pemerintah di Kementrian Agama Kabupaten Lebak

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian ilmu yang berguna sebagai rujukan, referensi, dan menjadi bahan informasi bagi peneliti lain dalam

melakukan penelitian khususnya informasi dalam laporan keuangan pemerintahan Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan serta mengembangkan keilmuan di bidang pemerintahan, khususnya mengenai informasi laporan keuangan pemerintahan di kementerian agama Kabupaten Lebak.

b. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Lebak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan evaluasi ke arah yang lebih baik serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi laporan keuangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.

d. Bagi Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan pembangunan pada umumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut George J. Gordon yang dikutip oleh Kencana (2011:33) menyatakan bahwa: “Administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta pengadilan”.

Menurut Sonny (2010: 35) keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menurut Surtendi (2010: 7) dijelaskan bahwa administrasi keuangan negara adalah semua hak kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam administrasi keuangan negara terdapat berbagai proses pengolahan keuangan negara, salah satunya adalah laporan Keuangan Pemerintahan. Pengertian Laporan keuangan pemerintah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yaitu :

“Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya.”

Nordiawan, dkk (2007: 294) Laporan Keuangan pemerintahan yaitu :

“Laporan keuangan pemerintahan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor dalam instansi pemerintahan. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang ada dalam pemerintahan.”

Laporan Keuangan Pemerintahan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, efisiensi suatu entitas pelapor, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

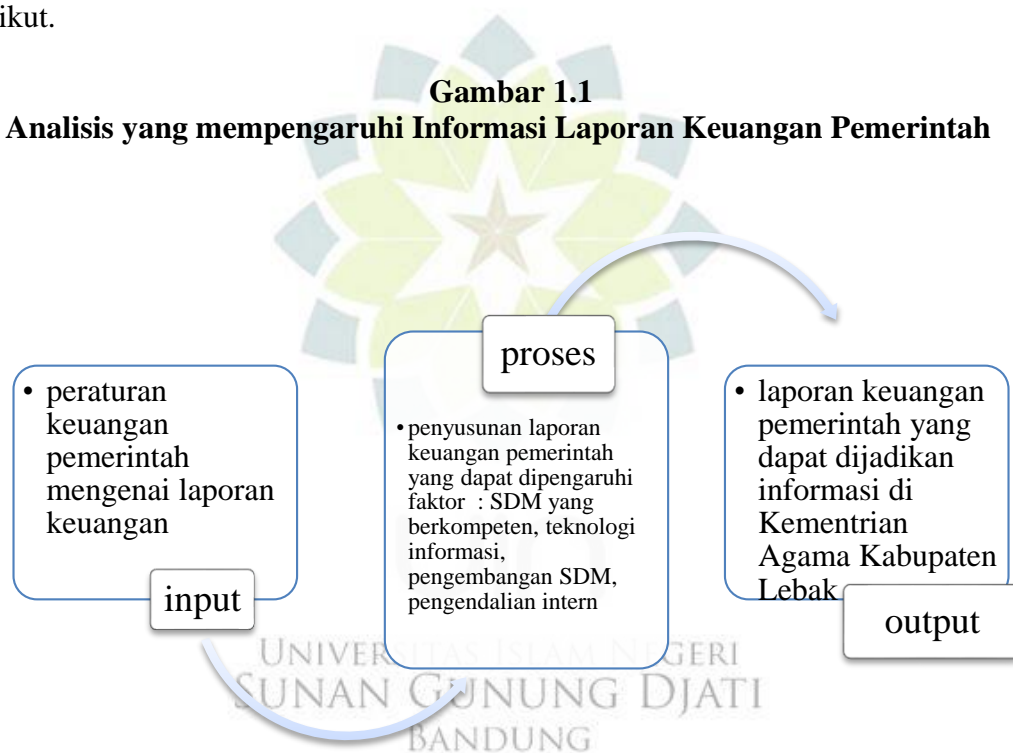
Menurut Siregar (2015:70) dalam bukunya akuntansi sektor publik, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Sumberdaya yang berkompeten untuk dapat menerapkan akuntansi pemerintahan
2. Teknologi informasi untuk mendukung berjalannya laporan akuntansi
3. Pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi informasi
4. Sistem pengendalian intern dan komitmen pimpinan dalam pelaporan keuangan

Kemertian Agama Kabupaten Lebak merupakan instansi pemerintahan yang juga menggunakan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam artian

lain, bahwa kementerian agama kabupaten lebak sendiri menyediakan laporan keuangan pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang adapat dijadikan informasi dalam mengambil keputusan. maka dari itu, laporan keuangan pemerintahan yang ada di kementerian agama kabupaten Lebak sendri dapat terpengaruh oleh beberapa faktor yang dapat berdampak pada informasi laporan keuangan tersebut sehingga dapat digambarkan dalam gambar berikut.

Gambar 1.1
Analisis yang mempengaruhi Informasi Laporan Keuangan Pemerintah



Sumber : Siregar (2015 : 70) akuntansi sektor publik